

**Dampak Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga : Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia (SNSE) 2008**

Siska Intan Permata Sari<sup>1</sup>

Lilik Sugiharti<sup>2</sup>

<sup>1,2\*</sup> Universitas Airlangga

E-mail: <sup>\*1</sup>siskaintanp@gmail.com

<sup>\*2</sup>lilik\_sugiharti@yahoo.co.id

**Abstract**

*This study aims to analyze the impact of Indonesian workers' remittances on income distribution of households, in which includes the total impact as well as the details of the road from the impact. The data used is the Social Accounting Matrix (SAM) of Indonesia in 2008. The methodology used is matrix multiplier balance with Leontief inverse analysis and details of the impact analyzed through decomposition of the matrix multiplier. The results of this study showed that the group of households that are affected most by the injection of remittances in the government sector is domestic agricultural entrepreneurs while the total impact on the production sector to get the most impact is the sector of Real Estate and Business Services sector, followed by trade.*

**Keywords:** *Remittance, Household Income Distribution, Production Sector Output, Social Accounting Matrix (SAM)*

**Pendahuluan**

Pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan masih menjadi permasalahan utama ketenagakerjaan. Indonesia memiliki 64,4% penduduk yang dikategorikan sebagai kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*) (World Bank, 2008). Keberadaan *vulnerable employment* mengakibatkan kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia. Terdapat dua ukuran distribusi pendapatan, yakni pendapatan perseorangan dan pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan perseorangan meliputi pendapatan rumah tangga yang diukur dari tingkat pendapatan disposibel rumah tangga. Kemudian, pendapatan fungsional digunakan untuk mengukur pendapatan nasional yang diterima setiap masing-masing faktor produksi.

Distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan mobilitas tenaga kerja ke daerah lain dengan tujuan mencapai upah yang lebih tinggi (Borjas 2003: 148). Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2008 hingga 2010 terjadi penurunan tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri. Penurunan tersebut terkait dengan adanya moneterium TKI ke negara Malaysia yang berlaku mulai 26 Juni 2009 hingga 1 Desember 2011 karena berbagai permasalahan TKI yang terjadi.

Jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri menyumbang remitansi sebagai sumber pendapatan devisa bagi institusi pemerintah dan pendapatan bagi rumah tangga. TKI di luar negeri memiliki *bergaining power* yang tinggi. Pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), *inflows* remitansi tersebut memberikan kontribusi 27% dari keseluruhan nilai *services*,

*income*, dan *current transfer* (Laporan Pola Remitansi TKI 2008). Penerimaan remitansi tahun 2008-2011 mengalami penurunan dan di tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014. Kenaikan remitansi didorong oleh kenaikan gaji di sejumlah negara di Asia (Singapura, Hongkong, Macau) serta Timur Tengah (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Yordania dan Suriah).

Remitansi yang masuk ke Indonesia menjadi sebuah injeksi pendapatan untuk keluarga TKI di daerah asal sehingga dapat meningkatkan daya beli rumah tangga golongan bawah. Kemudian secara berkesinambungan akan berpengaruh pada distribusi pendapatan dan *output* sektor industri. Studi empiris mengenai remitansi yang dilakukan oleh Sulistyorini, dkk (2014) menghasilkan kesimpulan bahwa dampak injeksi remitansi terhadap perekonomian dapat dilihat terhadap peningkatan pendapatan institusi utamanya rumah tangga, peningkatan *output* di sektor produksi sebagai akibat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan kenaikan alokasi nilai tambah bagi faktor produksi.

Ketidakterdistribusi pendapatan menyebabkan mobilitas tenaga kerja ke luar negeri untuk mencapai upah yang lebih tinggi. Sebagai kontribusi kepada negeri, remitansi menjadi injeksi pendapatan devisa bagi blok institusi sektor pemerintahan dan pendapatan bagi sektor rumah tangga. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk **“Dampak Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dan *Output* Sektor Produksi: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2008”**

## Tinjauan Literatur

### Konsep Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat (UU Pokok Ketenagakerjaan no .13 tahun 2013. Batas umur kerja di Indonesia adalah 15 tahun keatas (UU no. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan). penduduk yang berumur 15 tahun namun tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan karena sekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau secara fisik dan mental tidak memungkinkan memasuki pasar tenaga kerja adalah bukan angkatan kerja. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tenaga kerja adalah:

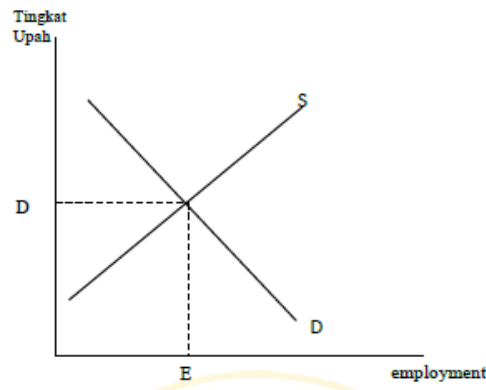
$$\text{Tenaga Kerja} = \text{Angkatan Kerja} + \text{Bukan Angkatan Kerja} \dots\dots\dots (1)$$

### Sistem Pengupahan

Menurut Moekijat (1992:27) sistem pengupahan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem upah menurut waktu, sistem upah menurut satuan hasil, dan sistem upah insentif. Sistem upah menurut waktu menggunakan tarif/waktu sebagai dasar perhitungan upah dan waktu digunakan sebagai dasar pada upah pekerja yang lebih banyak menekankan mutu dibandingkan hasil (*output*). Kemudian, upah menurut satuan hasil akan mendorong pekerja lebih produktif tanpa memperhatikan pekerjaan. Sedangkan upah insentif ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan pekerja yang akan menjadi premi atas prestasi kerja apabila melebihi standar yang ditetapkan.

### Penawaran dan permintaan Tenaga Kerja

Proses bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja disebut pasar tenaga kerja (Simanjutak, 1998:4). Jumlah tenaga kerja ditentukan oleh permintaan tenaga kerja dari masyarakat. Teori neoklasik menyatakan bahwa penawaran tenaga kerja meningkat seiring dengan peningkatan upah tenaga kerja dengan asumsi semua pihak mendapat informasi lengkap pasar tenaga kerja. Sehingga dalam keadaan ekuilibrium tidak ada pengangguran karena semua pencari kerja akan mendapat pekerjaan (Gambar 1).



Sumber: Borjas

**Gambar 1. Kurva Keseimbangan Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja**

### Distribusi Pendapatan

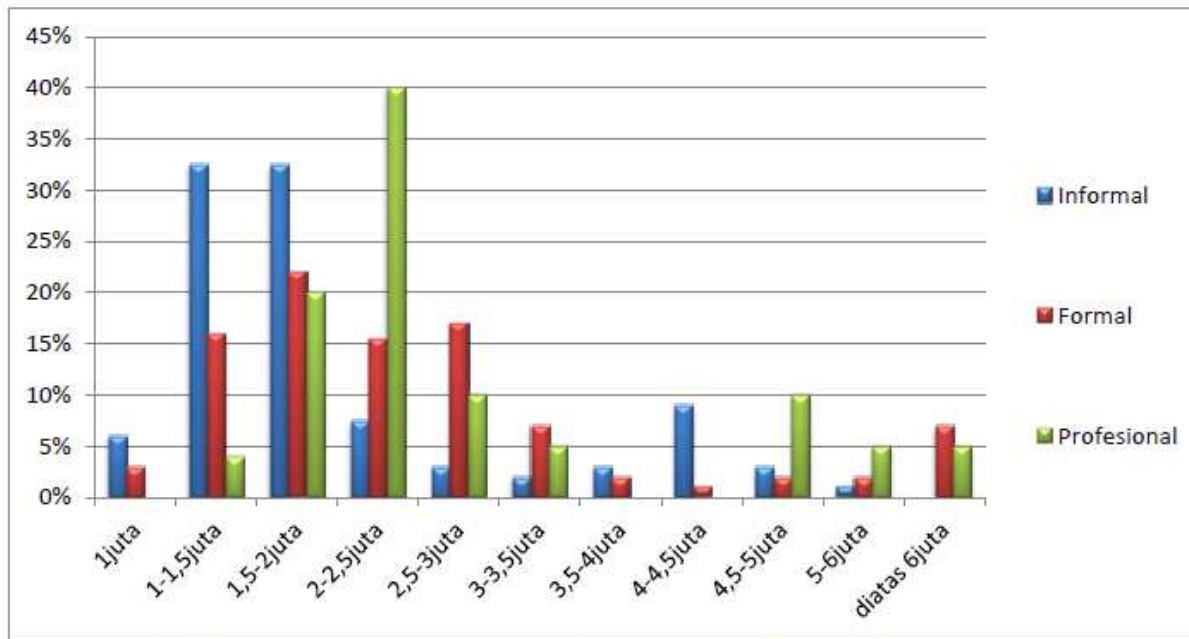
Distribusi pendapatan merupakan ukuran merata atau timpangnya pendapatan dalam kelompok masyarakat. Menurut Todaro (2000:180-182), distribusi pendapatan dibagi menjadi dua yakni yang pertama pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*). Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima. Kedua, distribusi pendapatan “fungsional” atau distribusi pangsa pendapatan menurut bagian faktor distribusi (*factor share distribution of income*). Dalam distribusi pendapatan ini dijelaskan seberapa besarnya proporsi pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi seperti *labor*, *capital*, dan *land*.

### Remitansi Tenaga Kerja Indonesia

Besarnya gaji yang diterima oleh TKI yang bekerja di luar negeri sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang ditekuni dan gaji TKI formal cenderung lebih tinggi dibandingkan TKI informal. Kelompok formal meliputi pekerja yang bekerja di pabrik, perkebunan/pertanian, maupun proyek konstruksi. Kelompok informal meliputi pekerja yang bekerja sebagai penatalaksana rumah tangga (*domestic helpers*) dan kelompok profesional hanya sebesar 1% yang meliputi konsultan, akuntan, guru/dosen, dan dokter/tenaga medis lainnya. Terdapat sebaran gaji TKI menurut jenis pekerjaan yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Menurut definisi Bank Indonesia (2009) remitansi adalah bagian gaji TKI yang masuk ke Indonesia melalui jalur pengiriman maupun dibawa secara langsung saat pulang ke Indonesia. Remitansi dapat berupa uang atau barang. *International Monetary Funds (IMF)* mendefinisikan remitansi ke dalam 3 kategori, yaitu remitansi dalam bentuk transfer atau cash pada keluarga di daerah asal, pendapatan *cash* yang dibayarkan pada individu yang bekerja di negara lain secara resmi, dan transfer uang dari orang asing sebagai transfer kapital

dari aset keuangan dari satu negara ke negara lain serta tinggal lebih dari satu tahun. Sedangkan remitansi menurut pola pengiriman dibagi dua, yaitu remitansi rutin yang diberikan terus menerus dan remitansi khusus pada saat-saat tertentu seperti hari besar keagamaan.



Sumber : Puslitfo BPN2TKI (2008)

Gambar 2. Sebaran Gaji TKI Menurut Sektor Pekerjaan

**Penelitian Sebelumnya**

Osaki (2003) pernah melakukan penelitian tentang kontribusi remitansi terhadap kesejahteraan rumah tangga di negara Thailand. Data yang digunakan adalah data dari hasil survei migrasi nasional Thailand (NMS) tahun 1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku remitansi di Thailand berhubungan dengan faktor sosio-ekonomi dan demografi. Migrasi internasional merupakan cara yang efektif untuk rumah tangga berpendapatan rendah dengan cepat mengatasi kekurangan pendapatan. Dari perspektif makro, remitansi berkontribusi terhadap pemerataan distribusi pendapatan antar rumah tangga yang memiliki pekerja migran.

Ahlburg (1996) juga pernah melakukan penelitian untuk mengetahui dampak remitansi terhadap distribusi pendapatan di negara Tonga. Data yang digunakan adalah data survei rumah tangga dengan cara mengambil sample 918 rumah tangga yang dilakukan tahun 1984. Metode yang digunakan *Mean Logaritmik Deviation*, indeks entropy, dan gini koefisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remitansi membuat distribusi pendapatan di Tonga pada pertengahan tahun 1980 lebih merata. Pada umumnya negara-negara Pasifik mendukung keyakinan yang lebih egaliter. Temuan ini memberikan dukungan bahwa pemerintah minimal harus mengakomodasi migrasi dan remitansi. Jika remitansi memiliki dampak yang bermanfaat untuk distribusi pendapatan, maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mendukung atau setidaknya tidak menghalangi migrasi. Jika pemerintah memutuskan untuk berperan aktif dalam mendorong migrasi dapat ditempuh

dengan cara mendukung atau mensubsidi migrasi pekerja berpendidikan rendah dan tidak terampil.

Sulistyorini, dkk (2014) juga melakukan penelitian tentang dampak kebijakan penempatan TKI terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model Sistem Neraca Nasional Ekonomi (SNSE) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2008 dan penghitungan indeks Theil. Hasil yang diperoleh penelitian tersebut adalah : (1). Kebijakan peningkatan penempatan TKI, program pelatihan dan kursus serta program pemberian kredit usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi TKI memberikan dampak terhadap peningkatan distribusi pendapatan rumah tangga, penerimaan pemerintah dan perekonomian negara dan (2). Kebijakan pembatasan (moratorium) penempatan TKI yang diikuti oleh program pelatihan dan kursus untuk TKI sektor informal yang gagal diberangkatkan, serta program kredit usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi TKI dapat menurunkan angka ketimpangan dari *base line*.

Adams (2005) melakukan penelitian untuk menguji dampak migrasi internasional dan penerimaan remitansi pada kemiskinan di negara berkembang. Data yang digunakan adalah hasil observasi data terbaru dalam migrasi internasional, remitansi, ketimpangan dan kemiskinan yang diambil dari 71 negara sedang berkembang pada tahun 1980-1996. Penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil yang diperoleh penelitian tersebut adalah : 1). Migrasi Internasional dan remitansi memiliki pengaruh yang kuat terhadap dampak pengurangan kemiskinan di negara berkembang dan 2) Dalam 10% kenaikan remitansi perkapita akan mendorong penurunan angka kemiskinan sebesar 3,5%.

**Model Analisis**

Penelitian ini menggunakan model analisis SNSE. Sistem kerangka data ekonomi dan sosial dalam SNSE dibuat dalam bentuk matriks yang menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat serta keterkaitan antara keduanya secara komprehensif, konsisten, dan terintegrasi (BPS,2008). Model yang digunakan untuk melihat besarnya dampak total kebijakan injeksi remitansi pada sektor pemerintahan terhadap distribusi pendapatan golongan rumah tangga dan *output* sektor produksi dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut (Daryanto dan Hafizrianda, 2010: 123):

$$\Delta Y = (I - A) - 1 \dots\dots\dots (2)$$

$$\Delta X = Ma . \Delta X \dots\dots\dots (3)$$

di mana:

$\Delta Y$  = Perubahan yang diberikan neraca eksogen terhadap neraca endogen

$Ma$  = Matriks pengali neraca endogen yang menunjukkan pengaruh perubahan sebuah sektor terhadap sektor lainnya

$\Delta X$  = Perubahan neraca eksogen berupa injeksi yang diberikan terhadap golongan rumah tangga

Jalannya pengali neraca ini terjadi melalui beberapa tahapan yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (Pyatt dan Round, 1979: 866):

$$Ma = Ma3 . Ma2 . Ma1 \dots\dots\dots (4)$$

pengali neraca dapat juga ditulis dengan (Pyatt dan Round, 1985):

$$Ma = I + (Ma1 - I) + (Ma2 - I)Ma1 + (Ma3 - I)Ma2 Ma1 \dots\dots\dots (5)$$

## Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model pengaruh perubahan eksogen pada SNSE 2008. Data injeksi yang digunakan adalah jumlah *inflows* remitansi Indonesia tahun 2014. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik matematis berupa matriks pengali dan dekomposisi matriks pengali, yaitu *transfer multiplier*, *open loop multiplier*, dan *closed loop multiplier*. Semua teknik matematis tersebut dikerjakan dengan menggunakan program *microsoft office excel*.

Dalam penelitian ini, olah data dan analisis menggunakan SNSE Indonesia tahun 2008 matriks 105x105 (Lampiran 1) yang kemudian diagregasi menjadi matriks 75x75. Setelah selesai melakukan agregasi, data SNSE 75x75 ini siap diolah berdasarkan model dengan melakukan perhitungan Matriks pengali neraca (Ma), dekomposisinya yang terdiri dari pengali transfer (Ma1), pengali *open loop* (Ma2), dan pengali *closed loop* (Ma3), dan kemudian merincikan jalannya dampak injeksi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan tersebut terdiri dari data utama dan data penunjang. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa tabel SNSE Indonesia tahun 2008 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Tabel distribusi pendapatan disposabel menurut golongan rumah tangga tahun 1985-2008 (2). Data Penerimaan remitansi dan penempatan tenaga kerja yang bersumber dari Unit Pelayanan Terpadu Pelayanan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) (3). Data gaji TKI yang bersumber dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (4) Data penunjang atau data yang berhubungan dengan pokok bahasan dan permasalahan yang diteliti yang bersumber dari studi literatur/studi pustaka tersebut.

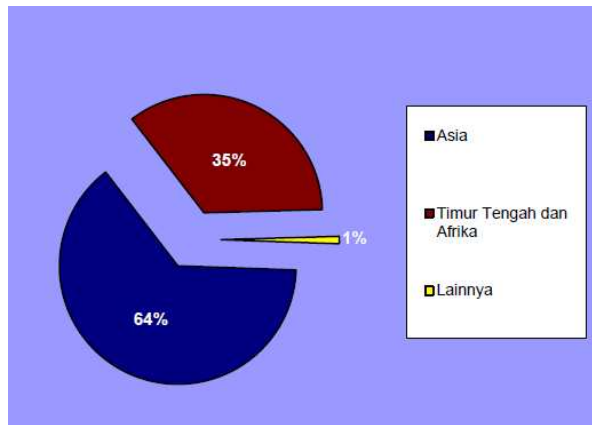
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis laporan, buku, dan dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Di dalam penelitian ini, digunakan teknik matematis yang berupa matriks kebalikan (*invers matrix*) maupun matriks pengali (*multiplier matrix*), untuk menghitung besarnya dampak injeksi. Setelah itu digunakan Matriks pengali terdiri dari pengali neraca yang kemudian didekomposisikan menjadi pengali transfer, pengali *open loop*, dan pengali *closed loop*. Analisis dilakukan dengan analisis invers Leontief.

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Umum Penelitian

#### *Kondisi Umum Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2008-2014*

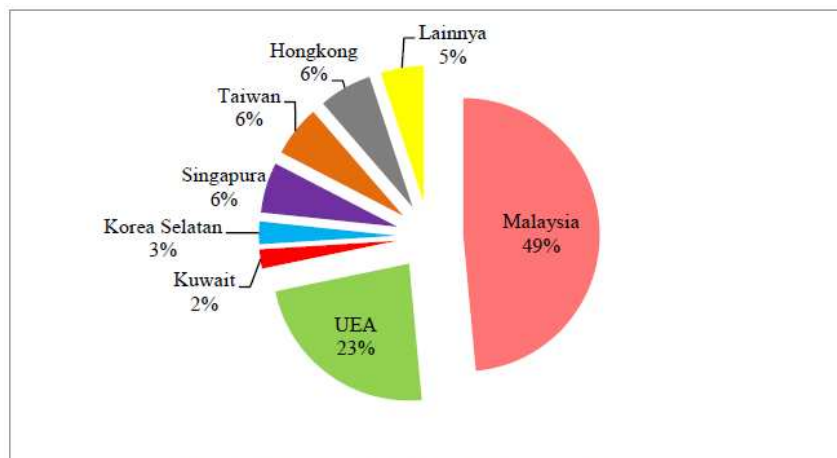
Kawasan Asia adalah penyumbang remitansi terbesar yaitu hingga 64%. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum pada Gambar 3. Penerimaan ini didominasi oleh remitansi yang berasal dari Malaysia sebesar USD 2,6 miliar (68%), diikuti dari Hongkong sebesar USD 417 juta (11%), dan Taiwan sebesar USD 358 juta (9,4%). Sementara itu *inflows* remitansi dari kawasan Timur Tengah dan Afrika mencapai 35% dari keseluruhan remitansi. Arab Saud merupakan penyumbang *inflows* remitansi terbesar di kawasan tersebut dengan nilai remitansi sebesar USD 1,7 miliar (83%), diikuti Uni Emirat Arab (UEA) sebesar USD 145 juta (7%), dan Yordania dan Suriah sebesar USD 84 juta (4%).



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

**Gambar 3. Persentase *Inflows* Remitansi TKI Menurut Kawasan**

*Inflows* remitansi tidak terlepas dari jumlah penempatan TKI di berbagai negara penempatan. Sebaran penempatan TKI cukup beragam, namun masih didominasi oleh penempatan di negara Malaysia dan Arab Saudi (UEA). Gambar 4 menjelaskan bahwa jumlah penempatan kedua negara tersebut berjumlah 47,4% dan 22,7%. Selebihnya penempatan TKI di Taiwan, Hongkong, Singapura, Korea Selatan, Kuwait, dan negara lainnya yang memiliki persentase sangat kecil (Australia dan Selandia Baru, China, Amerika, Brunei Darusalam, dll).



Sumber : UP3TKI Jawa Timur (diolah)

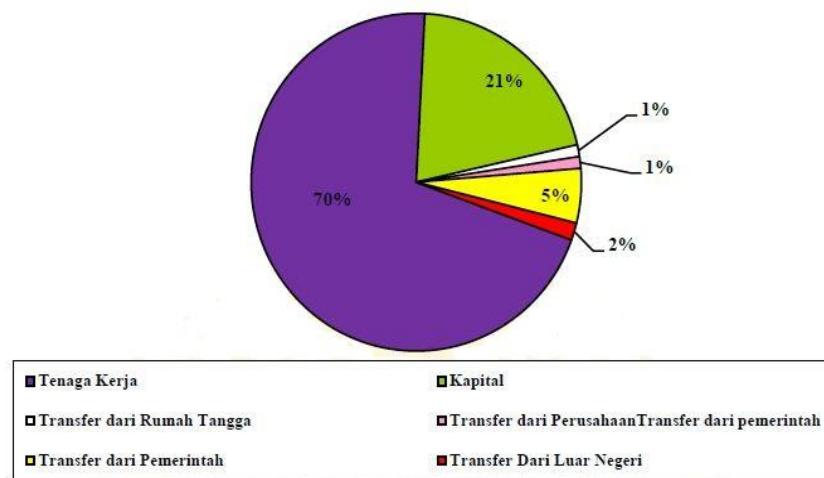
**Gambar 4. Sebaran TKI Menurut Negara (Dalam Persen)**

Penyerapan TKI ini sebagian besar pada sektor informal. Hampir disemua negara Asia Timur, Timur Tengah dan Asia Tenggara merupakan penempatan pekerjaan di sektor informal sebagai Penatalaksana Rumah Tangga (*domestic helpers*) dengan gaji Rp. 1.000.0000 - Rp. 1.500.000/bulan. Berbeda dengan negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya, di negara Singapura yang hampir seluruh penempatan (96%) di sektor formal yang meliputi sektor pekerja pabrik dan tukang di proyek konstruksi. Gaji TKI di sektor formal lebih tinggi dibanding sektor informal yaitu sekitar Rp. 2.000.000-Rp. 2.500.000/bulan. Sedangkan TKI di kelompok profesional hanya sebesar 1% yang berprofesi sebagai akuntan, konsultan, guru/dosen, dan dokter.

*Kondisi Umum Perekonomian Indonesia Berdasarkan SNSE Tahun 2008*

Ditinjau dari data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia tahun 2008, pendapatan faktor produksi tenaga kerja Indonesia pada tahun 2008 lebih besar daripada jumlah pendapatan kapital. Pendapatan tenaga kerja berjumlah Rp 2.692.617,74 miliar sedangkan pendapatan kapital berjumlah Rp 2.464.317,45 miliar yang bila ditotal akan diperoleh nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar biaya faktor (*at factor costs*) tahun 2008 sebesar Rp 5.156.935 miliar (BPS, 2010).

Dari seluruh golongan rumah tangga, golongan rumah tangga tenaga kerjamemiliki total pendapatan rumah tangga yang terbesar yaitu 70% dari keseluruhan pendapatan golongan tersebut (Gambar 5) .Pendapatan ini juga merupakanjumlah upah dan gaji termasuk upah dan gaji.



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 5. Presentasi Total Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia**

Sumber pendapatan institusi pemerintah berasal dari pajak penghasilan perusahaan pajak tidak langsung, transfer antar pemerintah, pajak langsung rumah tangga, dan transfer dari luar negeri. Dari total pendapatan institusi pemerintah sebesar Rp 1.916.701,70 miliar paling banyak berasal dari pajak penghasilan perusahaan yaitu sebesar Rp 650.052,59 miliar, selebihnya berasal dari pajak tidak langsung Rp.85.073,47, transfer antar pemerintah Rp.181.676,37, pajak langsung rumah tangga Rp. 344.939,89, dan transfer dari luar negeri Rp. 2.291,08.

Institusi rumah tangga memiliki beberapa sumber pendapatan, yaitu upah dan gaji, pendapatan kapital dari balas jasa modal, serta transfer dari pihak lain. Transfer pihak lain tersebut dapat dirincikan ; transfer antar rumah tangga adalah sebesar Rp 43.364,57 miliar, transfer dari perusahaan sebesar Rp 43.085,00 miliar, transfer dari luar negeri Rp 63.505,87 miliar, dan transfer/subsidi dari pemerintah sebesar Rp 199.033,92 miliar. Pendapatan yang berasal dari sumber-sumber tersebut kemudian digunakan oleh institusi rumah tangga untuk membiayai berbagai keperluan.

Kemudian, produksi domestik menyumbang sebesar Rp 10.175.382,48 miliar untuk pendapatan sektor produksi Indonesia dan yang berasal dari subsidi pemerintah sebesar Rp 199.701,98 miliar. Sektor produksi harus membayar penggunaan faktor produksi tenaga kerja sebesar Rp 2.692.617,74 dan faktor produksi bukan tenaga kerja Rp 2.464.317,45.



Kelompok rumah tangga golongan atas di pedesaan maupun perkotaan memiliki total pendapatan sebesar 23% - 30% yang sumbernya dari kepemilikan modal. Keterbatasan akses terhadap kepemilikan faktor menyebabkan kelompok rumah tangga golongan bawah seperti kelompok rumah tangga pertanian dan rumah tangga golongan rendah di pedesaan dan perkotaan melakukan migrasi ke luar negeri dan mengirimkan sebagian pendapatannya kepada keluarga yang ditinggalkan. Hal ini menjadikan pendapatan kelompok rumah tangga tersebut yang menerima tambahan pendapatan dari remitansi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok rumah tangga lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

### *Dampak Total Kebijakan Injeksi Remitansi Pada Sektor Pemerintahan Terhadap Distribusi Pendapatan Golongan Rumah Tangga SNSE 2008*

Dampak total dari kebijakan injeksi remitansi pada sektor pemerintahan terhadap distribusi pendapatan golongan rumah tangga dapat dilihat melalui matriks pengali neraca. Pengaruh total kebijakan injeksiremitansi sebesar Rp105.982 pada sektor pemerintahan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga. Dampak terhadap distribusi pendapatan golongan rumah tangga dilihat melalui baris neraca institusi golongan rumah tangga dan kolom neraca institusi pemerintahan. Dampak total yang diterima oleh golongan rumah tangga akibat kebijakan injeksiremitansi pada sektor pemerintah senilai Rp. 61953,15. Hal tersebut menunjukkan bahwadampak total pemberian injeksi terbesar dari pendapatan rumah tangga di Indonesia berada pada golongan rumah tangga pengusaha pertanian, hal ini terlihat dari dampak injeksi remitansi pada golongan rumah tangga pengusaha pertanian (kode 19) yang meningkat sebesar Rp 13558,92. Sementara itu, efek multiplier yang paling rendah dimiliki rumah tangga bukan angkatan kerja (BAK) di desa.

Adanya efek multiplier institusi rumah tangga golongan pengusahapertanian yang lebih besar dibandingkan dengan institusi rumah tangga golongan bukan angkatan kerja di desa, dapat diartikan bahwa kegiatan ekonomi yang berjalan di Indonesia ternyata berada dipihak rumah tangga golongan menengah keatas. Hal ini dapat diartikan jika sistem perekonomian yang berjalan di Indonesia masih belum tersentuh untuk pemerataan pendapatan di golongan bawah. Pengusaha pertanian merupakan golongan yang menerima dampak terbesar,hal ini disebabkan karena pendapatan yang diterima oleh golongan bawah cenderung langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan yang kemudian menjadi pemasukan bagi pengusaha pertanian. Temuan ini dikonfirmasi oleh kajian dari (Sulistyorini, 2005):

“Kelompok rumah tangga yang paling terpengaruh adalah kelompok rumah tangga pengusaha pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berasal dari kelompok rumah tangga ini”.

Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kenaikan pendapatan rumah tangga akibat injeksi remitansi pada sektor pemerintahan akan memberikan dampak distribusi pendapatan yang baik bagi golongan rumah tangga.

### *Dampak Total Kebijakan Injeksi Remitansi Pada Sektor Pemerintahan Terhadap Sektor Produksi SNSE 2008*

Dampak total dari kebijakan injeksi remitansi pada sektor pemerintahan *output* sektor produksi dapat dilihat melalui matriks pengali neraca. Pengali dapat memberi gambaran pengaruh total kebijakan injeksi sebesar Rp105.982 pada sektor pemerintahan terhadap

output sektor produksi. Dampak terhadap distribusi pendapatan golongan rumah tangga dilihat melalui baris neraca sektor produksi dan kolom sektor pemerintahan.

Dampak total yang diterima oleh golongan rumah tangga akibat kebijakan injeksi remitansi Rp. 105.982 pada sektor pemerintah adalah peningkatan output sebesar Rp. 256.404,26. Sektor yang mengalami peningkatan output paling besar adalah sektor Real Estate dan Jasa Perusahaan (kode 47), yaitu senilai Rp 39.309,55. Kemudian, sektor yang mengalami peningkatan output paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian lainnya (kode 34), yaitu hanya senilai Rp 396,16.

Sektor Real Estate dan Jasa Perusahaan (kode 47) dan sektor perdagangan (kode 42) merupakan dua sektor yang mendapat dampak paling besar akibat adanya injeksi sebesar Rp105.982 pada sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan pendapatan yang berasal dari penerimaan remitansi sehingga rumah tangga akan mempunyai kelebihan pendapatan. Setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi di dalam rumah tangga yang maka institusi rumah tangga akan cenderung menggunakan pendapatan tersebut untuk biaya membangun rumahnya/*residential investment*.

*Residential investment* tapi juga memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Rumah tidak hanya sebagai kebutuhan dasar bagi institusi rumah tangga, karena pembelanjaan untuk perumahan tidak hanya memberi efek multiplier. Rumah yang dimiliki TKI di daerah asal tidak hanya menjadi tambahan kekayaan tetapi juga dapat meningkatkan *utility* dan rasa aman sehingga di masa mendatang, individu pada rumah tangga akan memilih untuk memilih melakukan konsumsi dan investasi lainnya yang jumlahnya lebih besar dalam perekonomian.

Hasil ini dikonfirmasi juga oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Djoni Hartono, 2011) bahwa *Residential investment* menjadi pilihan pertama dalam memanfaatkan kelebihan pendapatan yang berasal dari penerimaan remitansi disebabkan karena kondisi rumah di daerah asal merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan para migran yang bekerja di luar negeri.

### *Rincian Jalan Dampak Kebijakan Injeksi pada Sektor Pemerintahan terhadap Distribusi Pendapatan Golongan Rumah Tangga dan Output Sektor Produksi*

Dalam penelitian ini, dekomposisi pengali akan menunjukkan tahapantahapandampak dari injeksi terhadap sektor. Agar jalannya dampak kebijakan injeksi tersebut dapat dilihat secara lebih rinci, maka dapat dilakukan dekomposisi pengali neraca menjadi pengali transfer, pengali *open loop*, dan pengali *closed loop*.

Pengali transfer menunjukkan pengaruh dari satu blok pada dirinya sendiri. Dari pengali transfer dapat diketahui pengaruh injeksi remitansi pada sektor pemerintahan terhadap sektor lain dalam blok yang sama, yaitu blok sektor produksi, setelah melalui keseluruhan sistem dalam blok tersebut sebelum berpengaruh terhadap blok yang lain. Pengali transfer ini disebut juga dampak jangka pendek. Di dalam penelitian ini, pengali transfer menunjukkan nilai untuk melihat dampak kebijakan injeksi remitansi pada sektor pemerintahan terhadap output sektor produksi saja karena matriks pengali transfer hanya menunjukkan pengaruh pada blok yang sama.

Pengali *open loop* merupakan pengaruh dari satu blok ke blok yang lain. Injeksi remitansi yang diberikan pada sektor pemerintahan akan mempengaruhi sektor lain di blok yang lain setelah melalui keseluruhan sistem dalam blok yang lain tersebut. Pengali *open loop* ini disebut juga dampak jangka menengah.

Pengali *closed loop* menunjukkan dampak yang terjadi pada satu set neraca yang diakibatkan oleh set neraca yang lain dan kembali lagi ke set neraca pertama dan demikian

seterusnya sampai dampaknya menjadi semakin kecil dan dapat diabaikan. Adanya injeksi remitansi pada sektor pemerintahan, akan menyebabkan kenaikan output sektor produksi dan output sektor produksi lainnya (dampak pengali transfer). Sektor-sektor yang mengalami peningkatan output tersebut memerlukan tambahan input, baik input primer ataupun input antara hingga pada batas di mana tidak terjadi lagi dampak injeksi tersebut.

Berdasarkan hasil estimasi maka dapat diketahui bahwa pemberian injeksi remitansi sebesar Rp 105.982 meningkatkan pendapatan di semua golongan rumah tangga. Dampak total kebijakan injeksi remitansi pada sektor pemerintahan terhadap distribusi pendapatan golongan rumah tangga adalah sebesar Rp 61953,151 dikontribusi dari dampak pengali pengali transfer sebesar Rp 17525,919 dan nilai dampak pengali *closed loop* sebesar Rp 4.4427,232. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pemberian injeksi sebesar Rp 105.982 pada sektor pemerintahan, maka pada dampak jangka pendek (pengali transfer), rumah tangga yang paling besar mengalami peningkatan pendapatan adalah institusi rumah tangga pengusaha tani (kode 19), yaitu sebesar Rp 3692,508 dan yang paling sedikit mengalami peningkatan pendapatan adalah institusi rumah tangga bukan pertanian Pengusaha bebas golongan atas di desa (kode 22), yaitu sebesar Rp 328,899, sedangkan pada dampak jangka panjang (pengali *closed loop*) rumah tangga yang paling besar mengalami peningkatan pendapatan adalah institusi rumah tangga pengusaha pertanian (kode 19) yaitu sebesar Rp 9019,180 dan yang paling sedikit mengalami peningkatan pendapatan adalah institusi rumah tangga bukan angkatan kerja di desa (kode 21), yaitu sebesar Rp 1905,242.

Dampak total kebijakan injeksi remitansi pada sektor pemerintah terhadap output sektor produksi adalah peningkatan output senilai Rp 256404,263. Berdasarkan hasil estimasi, nilai tersebut dikontribusi dari dampak pengali *open loop* senilai Rp 125284,315 dan dampak pengali *closed loop* senilai Rp 131119,947. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor produksi yang mengalami peningkatan output paling besar pada dampak pengali *open loop* adalah sektor Real Estate dan Jasa Perusahaan (kode 47) yaitu senilai Rp 32862,798, kemudian sektor perdagangan (kode 42) senilai Rp 13876,843. Dalam jangka menengah, sektor yang paling berpengaruh adalah Real Estate dan Jasa Perusahaan (kode 47) kemudian sektor perdagangan (kode 42). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kaitan erat antara adanya injeksi sektor pemerintahan yang kemudian berdampak pada pendapatan institusi rumah tangga dan kemudian pertambahan pendapatan ini akan cenderung digunakan institusi rumah tangga untuk *residential investment*. Sektor yang mengalami peningkatan output paling kecil adalah sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya yaitu hanya (kode 34) sebesar Rp. 219,268.

Dalam jangka panjang, dampak injeksi remitansi setelah melalui blok neraca institusi dan kembali lagi ke blok institusi (pengali *closed loop*) yang paling besar adalah peningkatan output pada sektor industri makanan, minuman dan tembakau (kode 35), yaitu senilai Rp 19.840,483. Kenaikan output yang cukup besar tersebut sangat terkait hubungannya dengan gaya hidup institusi rumah tangga dalam jangka panjang. Adanya tambahan pendapatan menyebabkan adanya kenaikan konsumsi, namun yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah konsumsi terhadap makanan dan minuman pabrik/ kalengan. Dalam jangka panjang, akan terjadi pergeseran kebutuhan instan dan cepat sehingga akan mempengaruhi output sektor makanan, minuman dan tembakau. Sektor lainnya yang terjadi kenaikan output adalah sektor perdagangan (kode 42), yaitu senilai Rp 17.715,149 dan sektor yang peningkatan outputnya paling kecil dalam dampak jangka panjang adalah sektor pertambangan dan penggalian lainnya (kode 34), yaitu senilai Rp 176,888.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya telah dijabarkan dapat dilihat bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya keterbatasan mengakses data sehingga dalam penelitian ini masih menggunakan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 2008. Selain itu, kerbatasan data yang tersedia untuk jumlah penempatan TKI juga membuat penulis hanya dapat menyajikan jumlah penempatan TKI hingga tahun 2013. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data terkini sehingga output penelitian dapat menggambarkan dampak injeksi remitansi terhadap keadaan perekonomian tahun tersebut.

### SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan

Penyerapan TKI hampir di semua negara Asia Timur, Timur Tengah dan Asia Tenggara merupakan penempatan pekerjaan di sektor informal sebagai Penata laksana Rumah Tangga (*domestic helpers*) dengan gaji Rp. 1.000.0000 - Rp. 1.500.000/bulan sedangkan gaji TKI di sektor formal lebih tinggi di banding sektor informal yaitu sekitar Rp. 2.000.000 - Rp. 2.500.000/bulan.

Dampak total yang diterima oleh golongan rumah tangga akibat kebijakan injeksi remitansi dari TKI pada sektor pemerintah sebesar Rp. 61.953,15. Rumah tangga mengalami peningkatan pendapatan paling besar adalah golongan rumah tangga pengusaha pertanian sedangkan yang terkecil adalah golongan rumah tangga bukan petani bukan angkatan kerja dari desa. Kemudian, dampak total yang diterima oleh sektor produksi akibat kebijakan injeksi remitansi pada sektor pemerintah adalah peningkatan output sebesar Rp. 256.404,26. Dampak total kebijakan injeksi remitansi pada sektor pemerintahan terhadap output sektor produksi adalah peningkatan output senilai Rp 256.404,263. Sektor produksi yang mengalami peningkatan output paling besar pada dampak pengali *open loop* adalah sektor Real Estate dan Jasa Perusahaan dan sektor yang mengalami peningkatan output paling kecil adalah sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Dampak pengali *closed loop* yang paling besar adalah peningkatan output pada sektor industri makanan, minuman dan tembakau dan sektor yang peningkatan outputnya paling kecil dalam dampak jangka panjang adalah sektor pertambangan dan penggalian lainnya.

#### Saran

Saran yang perlu diperhatikan agar pemasukan remitansi dapat meningkatkan pendapatan institusi rumah tangga dan output sektor produksi adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan pihak terkait hendaknya meningkatkan kemampuan tenaga kerja utamanya tenaga kerja yang masih berketrampilan rendah melalui program pelatihan dan kursus intensif pra keberangkatan
2. Pemerintah dan pihak terkait hendaknya mendorong usaha kecil dan menengah melalui pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan.
3. Pemerintah dan lembaga perbankan hendaknya mempermudah akses dan sarana prasarana pengiriman remitansi tenaga kerja Indonesia, sehingga para TKI tidak lagi memilih jalur non-perbankan untuk menyalurkan gaji kepada keluarga di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Ruky. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Afiatno, B.E. 2003. *Analisis SNSE (Sistem Neraca Sosial Ekonomi) Indonesia Tahun 1995*. Surabaya: ISEID dan FE Unair
- Ahlburg 1996. *Remittances and the Income Distribution in Tonga*. Journal Population Research and Policy Review No.15 :391-400.
- Barham, Bradford dan Stephen Boucher. *Migration, remittances, and inequality: estimating the net effects of migration on income distribution*. Journal of Development Economics Vol. 55 (1998) 307-331
- Bourguignon, F. 4 Februari, 2004. *"The Poverty-Growth-Inequality Triangle"* New Delhi : Dewan Penelitian Hubungan Ekonomi Internasional
- Borjas, George.J. 2000. *"Labor Economics"*. International Edition. Irwin : McGraw Hill-USA
- Budijanto. 2015. *Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia Dan Pemanfaatan Remitansi di Daerah Asal*. International Journal Of Social And Local Economic Governance(IJLEG).Vol. 1, No. 1, April 2015, Pages 1 – 11
- Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI). 2013. Laporan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BPS. 2005. *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2003*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2010. *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Daryanto, A. dan Hafizrianda, Y. 2010. *Analisis Input-Output & Social Accounting Matrix untuk Pembangunan Ekonomi Daerah*. Bogor: IPB Press.
- Defourny, J. dan Thorbecke, E. 1984. *Structural Path Analysis and Multiplier within a Social Accounting Matrix Framework*. *The Economic Journal*, 94 (373), 111- 136.
- Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter. 2008. *Survei Nasional Pola Remitansi TKI*. Jakarta: Bank Indonesia
- Hartono, Djoni. 2011. *Peranan Sektor Perumahan Terhadap Perekonomian Indonesia* (online), (<http://www.slideshare.net/OswarMungkasa/dampakpembangunanperumahan-terhadap-perekonomian-indonesia> , diakses 23 januari 2016)
- Hartono, D. dan Resosudarmo, B.P. 1998. Eksistensi Matriks Pengganda dan Dekomposisi Matriks Pengganda Pyatt dan Round dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 46 (4), 473-496.
- International Monetary Fund. 2009. *Balance of Payments and International Investment Position Manual*. Sixth Edition. Washington : International Monetary Fund.
- Jr, Richard H. Adams. 2005 . " *Do International Migration And Remittances Reduce Poverty In Developing Countries?*". *World Development* Vol. 33, No. 10, pp. 1645–1669
- McCulloch, N., dkk 2000. *"Poverty, Inequality, and Growth in Zambia during the 1990s"* Krakow, Polandia : Konferensi Umum ke 26 Asosiasi Internasional untuk Penelitian tentang Pendapatan dan Kekayaan.
- Moekijat, 1992. *Administrasi Gaji dan Upah*. CV Mandar Maju, Bandung.
- Nasution, M. Arif. 1996. *Proses Perjalanan Imigran Indonesia Ke Malaysia*. Kertas Kerja pada Seminar Peranan Tenaga Kerja Asing dalam Pembangunan. Medan, 27 Mei.

- Nizar.Muhammad Afdi. *Pengaruh Aliran Masuk Devisa Tenaga Kerja (Workers' Remittances) Terhadap Nilai Tukar Rupiah*. Kementerian Keuangan RI: Jakarta
- Laboratorium Ilmu Ekonomi FE UI. 2006. *Modul Model Interegional Input- Output(IRIO)*. DepokUPT P3TKI. 2010. Laporan Tahunan Remitansi dan Penempatan TKI: Surabaya
- Lind, D.A., Marchal, W.G., Mason, R.D. 2002. *Statistical Techniques in Business & Economics*. (ed. 11th). New York: McGraw-Hill
- Osaki, K. 2003. *Migrant Remittances in Thailand: Economic Necessity or Social Norm?*. Journal of Population Research, 20 (2): 203-204.
- Prihanto, Purwaka Hari. 2013. *Pengaruh Status Pekerjaan dan Negara Penempatan Terhadap Remitansi Pekerja Migran Indonesia*. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol 1 No.7 Tahun 2013
- Pyatt, G. dan Round, J. I. 1979. Accounting and Fixed Price Multipliers in a Social Accounting Matrix Framework. *The Economic Journal*, 89 (356), 850-873.
- Pyatt, G. dan Round, J. I (Eds.). 1985. *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*. Washington, D.C: The World Bank.
- Ravallion, M. "Can High-inequality Developing Countries Escape Absolute Poverty?" *Economics Letters*, 56, hal. 51-57, 1997
- Rifai, A.I.A. 2012. *Dampak Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi* dalam Tesis Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Skeldon, Ronald. 2003. *Migration and Poverty*. <http://pum.princeton.edu/pumconference/papers/6-Skeldon.pdf>. Diakses 05 september 2015
- Sulistyorini, Yuni, dkk. *Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Indonesia*. Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar. Volume 18, Nomor 1, Januari 2014
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (ed. ke-7). (Terj. Haris Munandar). (Ed. Yati Sumiharti). Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1969 tentang Tenaga Kerja.
- Undang-Undang No.20 Pasal 1 ayat 1 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.